BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki keragaman etnis, ras, kebudayaan, dan agama. Walaupun demikian, Islam adalah agama yang paling umum dijumpai dan menjadi mayoritas di Indonesia. Oleh karena itu, wajar jika budaya, hukum, dan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh teori dan ajaran Islam serta Ekonomi Syariah. Hal ini terlihat dari adanya beberapa lembaga negara yang didasarkan pada ajaran Islam yang berdirinya di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1), adapun yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.

Wakaf adalah salah satu ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan sosial dalam rangka ibadah. Meskipun bersumber dari hukum Islam, wakaf telah diterima oleh tradisi adat di Indonesia sejak lama, di berbagai daerah di Nusantara. Praktik mewakafkan tanah untuk keperluan umum, terutama untuk peribadatan sosial seperti masjid, sekolah, mushallah, madrasah, dan makam, telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak dulu. Demikian pula, perwakafkan benda bergerak seperti kendaraan, uang, surat berharga, hak atas kekayaan

intelektual, hak sewa logam mulia, dan benda bergerak lainnya, telah diatur dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, sesuai dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi, inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf tunai, wakaf HAKI dan lain-lain.²

Dengan adanya wakaf di Indonesia maka banyak sekali ajaran wakaf yang berkembang salah satunya mengenai teori wakaf yang menyebabkan masyarakat ingin menjalankan wakaf sesuai dengan syariat dan aturan-aturan yang berlaku. Semakin banyaknya masyarakat Indonesia khususnya kaum muslim ingin melaksanakan wakaf, maka pemerintah pun mengeluarkan peraturan mengenai wakaf.

Adapun pemerintah membuat aturan mengenai wakaf guna untuk masyarakat mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf dimungkinkan menjadi lebih tertib, mudah dan aman dari kemungkinan perselisihan dan penyelewengan. Diharapkan perwakafan tanah milik menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat Islam dan rakyat Indonesia umumnya.

Pengelolaan wakaf bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan penyelewengan harta wakaf sehingga pemerintah membuat aturan yang

¹Junaidi & Kamasarudin, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf*, Jurnal Syariah Vol. VII, No. 2, Oktober 2019. hlm.66.

²Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2003, hlm.11.

mengatur mengenai wakaf agar wakaf ini tersalurkan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian dalam pengelolaan wakaf ini masyarakat memerlukan pemerintah sebagai pihak ketiga dalam memberikan peringatan bagi penyelewengan atas pengelolaan wakaf sehingga dapat diatasi.

Pengaturan wakaf dimulai sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Agraria yang lebih dikenal sebagai UUPA. Kemudian, dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengenai Wakaf Tanah Milik. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 juga terbit sebagai antisipasi atas Kompilasi Hukum Islam yang akan diberlakukan, dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dengan disahkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Perwakafan di Indonesia semakin jelas. Dalam KHI ini, Wakaf diatur pada Buku III. Kandungan Buku III yang terdiri dari 5 BAB dan 14 Pasal (215-229).

Kemudian seiring waktu, pengetahuan mengenai wakafpun semakin luas, dimana wakaf tidak hanya dikaitkan dengan tanah, melainkan muncul istilah wakaf uang dan wakaf produktif. Keinginan ini terwujud dengan lahirnya Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Dengan adanya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat mengenai sengketa wakaf.

Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut telah lama didambakan dan dinantikan oleh masyarakat kita, khususnya umat Islam. Masalah tersebut telah menjadi problem yang cukup lama karena belum ada Undang -

Undang yang secara khusus tentang wakaf sehingga perwakafan di negeri kita kurang berkembang secara optimal. Karenanya, amat pantas bagi jamaah Muslim khususnya, serta rakyat Indonesia umumnya, untuk memberikan penghargaan yang positif pada undang-undang wakaf. Kehadiran regulasi ini merupakan suatu perbaikan dari beberapa peraturan wakaf yang sudah ada, dengan memasukkan elemen baru sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf yang produktif.³

Didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 47 Ayat (1) memuat lembaga yang menyelesaikan sengketa wakaf yakni Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan badan yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia berdasarkan amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini secara spesifik bertugas mengembangkan pengelolaan sehingga menghasilkan manfaat wakaf yang dapat menyejahterakan umat.⁴

BWI berkedudukan di Ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/ kota sesuai dengan kebutuhan. Undang-undang ini menyebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuk Badan Wakaf Indonesia.⁵

Salah satu tujuan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dalam melaksanakan

³Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007) , hlm.89.

⁴Suwardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm.32.

⁵Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama media,2019). hlm.120.

tugasnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen. Untuk menunjang peranannya tersebut, Badan Wakaf Indonesia harus ditunjang dengan elemen kelembagaan yang kuat dan stabil supaya lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Badan Wakaf Indonesia diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pengelolaan wakaf dan menyelesaikan sengketa wakaf.

Lembaga Badan Wakaf Indonesia diharapkan mampu menjadi pihak yang dapat menyelesaikan sengketa wakaf tanpa harus menyelesaikan ke Pengadilan atau disebut juga dengan Penyelesaian Non Litigasi. Tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa perwakafan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (BAB VII Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) menjelaskan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Seseuai dengan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 62 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa apabila telah terjadi sengketa wakaf maka hal pertama yang dilakukan adalah musyawarah mufakat dan alternatif penyelesaian sengketa dan apabila telah dilakukan upaya tersebut tetapi tidak menemukan titik terang, maka litigasi atau pengadilan menjadi terakhir dalam penyelesaian.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 62 menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan terhadap harta benda wakaf agar terlebih dahulu mengutamakan Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Hukum Positif sikap musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil dilakukan, dapat diselesaikan melalui mediasi

maupun arbitrase. Jika ketiga cara tersebut juga tidak berhasil dilakukan, maka cara terakhir yang harus ditempuh adalah melalui jalur pengadilan (*litigation*).⁶

Alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh pihak Badan Wakaf Indonesia sendiri merupakan mediasi. Mediasi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia dalam penyelesaian sengketa wakaf ini dimana sebagai pihak ketiga yang membantu kedua pihak yang berselisih pendapat sehingga ditemukanlah kesepakatan dalam perkara wakaf ini.

Pemecahan masalah melalui mediasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian masalah. Menurut Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, mediasi adalah proses kegiatan yang dilakukan setelah negosiasi para pihak gagal sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Namun, undang-undang ini tidak memberikan definisi yang jelas mengenai mediasi atau mediator.⁷

Penyelesaian sengketa wakaf sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 62 Ayat (2) . Dimana Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Jambi memilih alternatif penyelesaian sengketa secara mediasi. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah agar masyarakat dalam melaksanakan wakaf dapat terlaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku agar tidak menimbulkan konflik sehingga tidak terjadinya sengketa. Hal ini dapat dilihat dari masih ada

⁶Junaidi Abdullah dan Nur Qodin, Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif, *Jurnal ZISWAF*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014. hlm. 48-49.

⁷Rika Iestari, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2013, hlm .223.

masyarakat kota jambi yang tidak menjalankan wakaf tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Berdasarkan penemuan penulis, di beberapa lokasi di Kota Jambi yaitu adapun permasalahan sengketa wakaf terjadi di Yayasan Pendidikan Alkindi dan Yayasan Pendidikan 2 Mei. Dimana dalam hal ini, pelaksanaan mediasi yang dilakukan mengalami kegagalan dikarenakan para pihak yang bersengketa tidak menjalankan wakaf sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Permohonan Mediasi Sengketa Wakaf Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Jambi Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jenis Sengketa	Jumlah Kasus	Keterangan	
				Berhasil	Gagal
1.	2020	1. Masjid	3	3	-
2.	2021	1. Yayasan Pendidikan 2. Masjid	2	1	1
3.	2022	1. Yayasan Pendidikan	1	-	1
Jumlah			6	4	2

Sumber Data : Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Jambi

Berdasarkan tabel diatas hal tersebut menunjukkan bahwa data permohonan mediasi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Jambi ada 6 kasus dimana 4 yang berhasil melakukan mediasi. Akan tetapi dalam kenyataannya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 62 dalam penyelesaian sengketa wakaf di Badan Wakaf Indonesia masih saja tidak berjalan dengan sesuai harapan karena masih ada saja masyarakat yang melakukan mediasi

di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Jambi tidak menemukan puncak perdamaian dalam arti kata mediasi yang dilakukanpun masih ada yang mengalami kegagalan dan dalam menjalankan wakaf sendiri, masyarakat tidak melaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Maka dari uraian diatas, penulis tertarik ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai **“Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa wakaf di Badan Wakaf Indonesia Kota Jambi?
2. Apakah faktor penghambat yang dihadapi Badan Wakaf Indonesia Kota Jambi dalam penyelesaian sengketa wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah studi harus memiliki sasaran yang tegas agar dapat memberikan panduan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan analisis permasalahan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa wakaf di Badan Wakaf Indonesia Kota Jambi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi hambatan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Jambi dalam menyelesaikan sengketa wakaf.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai mediasi yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesiaa dalam menyelesaikan sengketa wakaf.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam memahami pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia dalam menyelesaikan sengketa wakaf.

E. Kerangka Konseptual

Adapun penelitian ini penulis menggunakan doktrin dan teori yang menyangkut dalam masalah yang akan diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini diantaranya :

1. Mediasi

Menurut Kamus Hukum, “Mediasi adalah kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator yang netral.”⁸

Dalam kepustakaan ditemukan banyak definisi tentang mediasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat.

⁸<https://www.kamushukum.web.id>, *Pengertian Mediasi* (diakses pada tanggal 14 Desember 2022).

2. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi dan non litigasi.

3. Wakaf

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 Ayat (1) Tentang Wakaf berbunyi :

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sebuah kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.”

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) Tentang Wakaf, berbunyi :

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama jangka waktu tertentu atau selamanya, sesuai dengan kepentingan, guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat.”

4. Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.⁹

⁹<https://www.bwi.go.id>, *Pengertian Badan Wakaf Indonesia*, (diakses: 13 Desember 2022).

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁰

Adapun Menurut Kelsen yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah :

“Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.”¹¹

Adapun menurut Utrecht yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah :

“Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui.”¹²

¹⁰Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulityawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstuksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 13

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

“Pertama-tama, bertanding (contending) merujuk pada upaya untuk menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak daripada yang lain. Kedua, mengalah (yielding) mengacu pada menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari apa yang sebenarnya diinginkan. Ketiga, pemecahan masalah (problem solving) melibatkan mencari alternatif yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Keempat, menarik diri (withdrawing) adalah pilihan untuk meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima, diam (in action) merujuk pada tidak melakukan tindakan apa pun.”¹³

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Kasus di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang. Disusun oleh Junaidi dan Kamasarudin Fakultas Hukum Universitas Islam Indragri Tembilahan, 2019. Penulis terdahulu menganalisis mengenai penyelesaian sengketa tanah wakaf secara musyawarah mufakat sedangkan penulis sekarang menganalisis penyelesaian sengketa wakaf yang dilaksanakan dengan cara mediasi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Jambi.
2. Problem Mediasi Penyelesaian Sengketa Wakaf Studi Kasus di Tanah Wakaf Mts Al-Falah Desa Kuwarowonn Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, Disusun oleh Irhamnia Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019. Penulis terdahulu

¹³ Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta : PustakaPelajar, 2004, hlm 4-6.

membahas mengenai problem mediasi dalam menyelesaikan sengketa wakaf sedangkan penulis sekarang membahas mengenai bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Jambi.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Jambi yang beralamat di Jalan Profesor Doktor Hamka Nomor 5, Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-empiris. Penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada aspek pengamatannya. Hal ini terkait dengan sifat obyektif dan pengalaman dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berusaha mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, di mana ini membutuhkan pengetahuan yang dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik awal pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.¹⁴

Karena dalam pendekatan penelitian hukum empiris ini melibatkan pengamatan terhadap individu dalam konteks kehidupan sosial, maka metode penelitian ini dikenal sebagai metode penelitian sosio-hukum. Hal ini disebabkan

¹⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.125.

oleh fokus penelitian hukum yang berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, badan hukum, maupun pemerintah.¹⁵

Secara yuridis melihat peraturan yang mengatur tentang mediasi di Badan Wakaf Indonesia Kota Jambi. Secara empiris dengan melihat apakah peraturan tersebut berjalan sesuai yang diharapkan dalam dalam mediasi di Badan Wakaf Indonesia Kota Jambi.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini tergolong deskriptif analitis, dimana dalam penelitian ini penulis menggambarkan dan mengurai secara rinci dan detail mengenai mediasi di Badan Wakaf Indonesia Kota Jambi.

4. Sumber Data

- a. Data Primer adalah informasi yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti melalui wawancara langsung dengan para pihak selama penelitian dilakukan di lapangan. Pengumpulan data primer ini terfokus pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Jambi sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa wakaf.
- b. Data sekunder merujuk pada informasi yang didapatkan dari sumber-sumber tertulis seperti buku-buku hukum, termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang dibahas, literatur, dan karya ilmiah yang relevan. Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

¹⁵ <https://www.gurupendidikan.co.id/macam-macam-metode-penelitian-hukum/> ,
Pengertian Penelitian Empiris (diakses pada tanggal 13 Desember 2022)

Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan yang digunakan.

- c. Data Tersier, yaitu sumber data yang menjelaskan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, diantaranya adalah teks hukum berupa majalah, kamus dan lain sebagainya. Adapun data tersier yang digunakan KBBI dan Kamus Hukum.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam suatu penelitian ilmiah Menurut Bahder Johan Nasution adalah :

“Populasi merujuk pada semua subjek, semua individu, semua fenomena, atau semua peristiwa yang meliputi waktu, tempat, karakteristik, pola perilaku, dan sebagainya yang memiliki sifat atau karakteristik yang sama dan merupakan unit yang akan diteliti.”

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah ada 2 kasus penyelesaian sengketa wakaf di Badan Wakaf Indonesia.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode *Purposive Sampling*.

Bahder Johan Nasution mengemukakan bahwa :

“*Purposive Sampling* cara memilih sampel dengan mempertimbangkan penilaian tertentu, karena unsur-unsur atau unit yang dianggap mewakili populasi. Pemilihan sampel harus didasarkan pada alasan yang masuk akal, seperti tingkat dominasi yang tinggi atau karakteristik sampel yang dipilih memiliki kesamaan dengan karakteristik populasi yang diinginkan. Dalam pemilihan sampel, unit sampel diambil dengan cermat sehingga sampel tersebut mencerminkan ciri-ciri populasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pemilihan sampel harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan pertimbangan yang matang.”¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hlm.159.

Sampel dalam penelitian ini penulis mengambil pihak Badan Wakaf Indonesia yang menyelesaikan sengketa wakaf dan nadzir.

6. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Proses pengumpulan, pemilihan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi lain.

b. Wawancara

Pengumpulan informasi dilakukan melalui proses wawancara, di mana penulis telah menyiapkan serangkaian pertanyaan untuk memperoleh keterangan melalui dialog langsung dan tatap muka.

c. Analisa Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Artinya data yang ada dikelompokkan menurut permasalahan yang diteliti, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan, kemudian diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dipahami, penulis menyusun sebuah struktur penulisan yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang asal mula masalah yang menjadi

titik tolak dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, bagian ini juga memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka konseptual, dasar teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan struktur penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DAN WAKAF

Pada bab ini menjelaskan tentang mediasi, wakaf dan tinjauan umum tentang Badan Wakaf Indonesia . Bab ini isinya mengenai pengertian mediasi, mengenai pengertian wakaf, dan mengenai badan wakaf indonesia. Bab ini merupakan kerangka teoritis yang didasarkan kepada judul dan objek penelitian penulis sebagai penjelasan teori dan landasan bagi bab selanjutnya.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Jambi serta hambatan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Jambi dalam menyelesaikan sengketa wakaf.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari pemaparan pada bab ketiga dan juga diikuti dengan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian pada skripsi ini.